

WALI KOTA PENATAAN AREAL PERKANTORAN LINGKAR SELATAN JADI PRIORITAS



Sumber: okezone.com

Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan penataan areal perkantoran Pemerintah Kota Mataram di jalan lingkaran selatan, ke depan harus menjadi prioritas agar proses kerja lebih baik dan masyarakat terlayani dengan nyaman.

"Dinas yang ada di areal perkantoran saat ini rata-rata dinas pelayanan dasar masyarakat, terutama untuk dinas kesehatan dan dinas kependudukan, sehingga masyarakat yang mengurus dokumen bisa lebih nyaman," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa.

Wali kota menyampaikan hal tersebut ketika melihat kondisi landscape areal kompleks perkantoran di jalan lingkaran selatan, yang kurang representatif karena belum di-hotmix, banyak genangan air, licin serta banyak tanaman liar yang tidak tertata.

Wali kota mengatakan, penataan landscape kompleks perkantoran itu sebenarnya akan dikerjakan Tahun 2021, akan tetapi anggaran tahun ini masih diprioritaskan untuk penanganan COVID-19.

"Semoga tahun depan, kondisi perkembangan COVID-19 bisa membaik, begitu juga dengan perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram H Miftahurrahman, sebelumnya mengatakan untuk proyek penataan landscape, areal kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram, jika memungkinkan diusulkan Tahun 2022.

Untuk Tahun 2021, kata dia, akan dibangun gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram dengan nilai Rp5,5 miliar, sekaligus untuk pembangunan musala.

"Musala itu sebagai bagian dari fasilitas pendukung, karena kawasan tersebut sudah menjadi kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram, sehingga banyak masyarakat yang datang mengurus pelayanan membutuhkan fasilitas musala," katanya.

Dikatakan, pembangunan gedung kantor BKPSDM dan musala menjadi prioritas proyek fisik Tahun 2021 agar gedung BKPSDM bisa segera dimanfaatkan.

"Pertimbangan lain, kalau landscape kami kerjakan juga, sementara pembangunan gedung kantor belum tuntas, dikhawatirkan akan rusak lagi karena mobilisasi alat berat," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/144320/penataan-areal-perkantoran-lingkar-selatan-mataram-jadi-prioritas> (Diakses 12 Januari 2021)
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/wali-kota-penataan-areal-perkantoran-lingkar-selatan-jadi-prioritas/> (Diakses 12 Januari 2021)

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjelaskan:

- Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.
- Dalam hal pandemi *Corona Virus Disease 2019* suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:
 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
 3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB